

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DALAM PENDIDIKAN ISLAM : ANALISIS KONSEPTUAL DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Reski Dayanti¹ Siti Julaiha² Yamani³

^{1,2}Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSI Samarinda

³Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia

¹reskidayanti33@gmail.com, ²siti.julaiha@uinsi.ac.id,

³yamani@universitasmulia.ac.id

ABSTRACT

Internal Quality Assurance System (SPMI) plays an essential role in maintaining and improving the quality of higher education, including within the context of Islamic education. This study aims to examine the basic concept of SPMI, its principles and components, its implementation in Islamic education, as well as the challenges and strategies for its strengthening. This research employs a qualitative approach using library research with a descriptive-analytical method. The findings indicate that, conceptually, SPMI has been well designed through the PPEPP cycle. However, its implementation still faces several challenges, particularly in structural, cultural, and technical aspects. A case study at SMP IT Insan Mulia shows that the main issue does not lie in the absence of the system, but rather in the lack of a strong quality culture. Therefore, strengthening SPMI should focus on transforming organizational culture and integrating Islamic values into quality assurance practices.

Keywords: *Internal Quality Assurance System (SPMI); education quality; Islamic education; quality culture; PPEPP cycle*

ABSTRAK

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan instrumen penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, termasuk dalam konteks pendidikan Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar SPMI, prinsip dan komponennya, implementasi dalam pendidikan Islam, serta tantangan dan strategi penguatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual SPMI telah dirancang secara sistematis melalui siklus PPEPP, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek struktural, kultural, dan teknis. Studi kasus SMP IT Insan Mulia menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan sistem, melainkan pada belum terbentuknya budaya mutu yang kuat. Oleh karena itu, penguatan SPMI perlu diarahkan pada transformasi budaya organisasi serta integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik penjaminan mutu.

Kata Kunci: *SPMI, mutu pendidikan, pendidikan Islam, budaya mutu, PPEPP*

A. Pendahuluan

Mutu dalam pendidikan Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai capaian akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan integritas peserta didik. Konsep ini sejalan dengan nilai *ihsan* dan *itqan* yang menekankan pentingnya kualitas dalam setiap aktivitas.¹ Namun dalam praktik lembaga pendidikan, mutu sering kali direduksi menjadi sekadar pemenuhan standar administratif.

Secara regulatif, penerapan SPMI telah menjadi kewajiban bagi setiap satuan pendidikan di Indonesia.² Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai standar dan terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa SPMI belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat peningkatan mutu yang efektif.

Kesenjangan antara konsep dan praktik menjadi persoalan yang cukup nyata. Banyak lembaga pendidikan

menjalankan SPMI hanya untuk memenuhi tuntutan akreditasi, bukan sebagai kebutuhan internal.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada desain sistem, tetapi pada cara sistem tersebut diimplementasikan dalam konteks organisasi.

Literatur Review

SPMI memiliki dasar teoritis dalam konsep Total Quality Management (TQM) yang menekankan perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan seluruh anggota organisasi.⁴ Deming mengemukakan bahwa mutu harus dikelola melalui siklus PDCA yang sistematis.⁵ Dalam konteks lembaga pendidikan di Indonesia, konsep ini diadaptasi menjadi siklus PPEPP.

Sallis menegaskan bahwa keberhasilan sistem mutu sangat bergantung pada budaya organisasi.⁶ Tanpa budaya mutu, sistem yang dirancang dengan baik tidak akan berjalan secara efektif. Hal ini

¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

³ Philip B. Crosby, *Quality is Free*, 23.

⁴ Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu*, 45.

⁵ W. Edwards Deming, *Out of the Crisis*, 88.

⁶ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, 33.

menunjukkan bahwa faktor manusia memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi SPMI.

Dalam perspektif Islam, mutu memiliki dimensi yang lebih luas. Al-Ghazali menekankan pentingnya keselarasan antara ilmu dan amal,⁷ sedangkan Ibn Khaldun melihat pendidikan sebagai faktor utama dalam kemajuan peradaban.⁸ Dengan demikian, mutu dalam pendidikan Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan spiritual.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan terkait SPMI. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan antara konsep teoritis, regulasi, dan fenomena empiris yang terjadi di satuan pendidikan, baik pada jenjang sekolah maupun perguruan tinggi.

Selain studi kepustakaan, artikel ini juga menggunakan pendekatan studi kasus terbatas (*quasi case study*) pada SMP IT Insan Mulia. Data diperoleh melalui observasi terbatas terhadap praktik pembelajaran, telaah dokumen seperti RPP dan instrumen evaluasi, serta wawancara informal dengan beberapa guru. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi, tetapi untuk memperkuat analisis dengan konteks empiris yang relevan.

C. Hasil Temuan

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah memiliki kerangka yang jelas melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Siklus ini dirancang sebagai mekanisme yang sistematis dan berulang, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen

⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*.

⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, 112.

refleksi untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Pendekatan siklus mutu ini sejalan dengan konsep *continuous improvement* yang menjadi fondasi utama dalam manajemen mutu modern.⁹

Prinsip-prinsip dasar yang melekat dalam SPMI, seperti berbasis data, partisipatif, dan berkelanjutan, secara teoritis telah mencerminkan pendekatan manajemen mutu modern. Pendekatan berbasis data menuntut setiap keputusan didasarkan pada bukti empiris, bukan sekadar asumsi. Hal ini sejalan dengan temuan Harvey dan Green yang menekankan bahwa kualitas dalam lembaga pendidikan harus diukur secara multidimensional dan berbasis evidensi.¹⁰ Sementara itu, prinsip partisipatif menekankan keterlibatan seluruh civitas akademika, yang menurut teori TQM merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi mutu.¹¹

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi SPMI tidak selalu berjalan sesuai dengan desain konseptualnya. Banyak lembaga pendidikan menghadapi kendala dalam menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik nyata. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara apa yang dirancang secara teoritis dengan apa yang terjadi di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Dill, sistem penjaminan mutu sering kali gagal bukan karena kelemahan konsep, tetapi karena lemahnya implementasi di tingkat institusi.¹²

Secara struktural, salah satu masalah yang sering muncul adalah belum optimalnya fungsi unit penjaminan mutu. Dalam banyak kasus, unit ini belum memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak memiliki daya dorong yang kuat. Bahkan, tidak jarang hasil audit mutu internal hanya berhenti pada laporan tanpa tindak lanjut yang jelas. Kondisi

⁹ W. Edwards Deming, *Out of the Crisis* (Cambridge: MIT Press, 1986).

¹⁰ Lee Harvey and Diana Green, "Defining Quality," *Assessment & Evaluation in Higher Education* 18, no. 1 (1993): 9–34.

¹¹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education* (London: Kogan Page, 2012).

¹² David D. Dill, "The Regulation of Public Research Universities," *Higher Education Policy* 20, no. 1 (2007): 21–35.

ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol dan evaluasi belum berjalan secara efektif. Fenomena ini juga ditemukan dalam penelitian Martin dan Stella yang menunjukkan bahwa kelemahan struktur organisasi dapat menghambat efektivitas sistem penjaminan mutu.¹³

Dari sisi kultural, tantangan yang dihadapi justru lebih kompleks. Budaya mutu belum menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari civitas akademika. Banyak guru yang masih memandang kegiatan penjaminan mutu sebagai beban administratif, bukan sebagai kebutuhan profesional. Misalnya, pengisian dokumen evaluasi pembelajaran sering dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tanpa disertai refleksi terhadap kualitas proses belajar mengajar yang sebenarnya terjadi di kelas. Hal ini sejalan dengan temuan Newton yang menyatakan bahwa budaya mutu yang lemah akan membuat sistem mutu hanya berjalan secara simbolik.¹⁴

Selain itu, aspek teknis juga menjadi kendala yang tidak kalah penting. Sistem informasi mutu yang belum terintegrasi menyebabkan data tersebar di berbagai unit tanpa koordinasi yang jelas. Akibatnya, proses evaluasi menjadi lambat dan kurang akurat. Sebagai contoh, data kehadiran guru, hasil belajar siswa, dan survei kepuasan sering kali tersimpan dalam sistem yang berbeda, sehingga sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang komprehensif. Dalam konteks ini, teknologi informasi seharusnya menjadi tulang punggung sistem mutu, bukan sekadar pelengkap administratif.¹⁵

Temuan-temuan tersebut menjadi lebih konkret ketika dikaitkan dengan studi kasus terbatas di SMP IT Insan Mulia. Berdasarkan observasi terhadap praktik pembelajaran dan telaah dokumen, sekolah ini telah memiliki perangkat mutu yang cukup memadai, seperti RPP, instrumen

¹³ Michaela Martin and Antony Stella, *External Quality Assurance in Higher Education* (UNESCO, 2007).

¹⁴ Jethro Newton, "Views from Below: Academics Coping with Quality," *Quality in Higher Education* 8, no. 1 (2002): 39–61.

¹⁵ Bjørn Stensaker, "Quality as Fashion: Exploring the Translation of a Management Idea into Higher Education," *Quality Assurance in Education* 15, no. 1 (2007): 99–118.

penilaian, serta kegiatan supervisi akademik yang dilakukan secara berkala oleh kepala sekolah.

Namun demikian, hasil pengamatan menunjukkan adanya variasi dalam implementasi mutu antar guru. Dari sejumlah kelas yang diamati, terdapat guru yang telah menyusun perencanaan pembelajaran secara sistematis dan melakukan evaluasi berbasis capaian kompetensi. Guru dalam kategori ini biasanya juga melakukan refleksi sederhana setelah pembelajaran, misalnya dengan mencatat kendala yang dihadapi siswa.

Di sisi lain, ditemukan pula praktik pembelajaran yang masih bersifat rutin tanpa variasi metode dan tanpa evaluasi yang mendalam. Dalam beberapa dokumen yang ditelaah, RPP disusun secara administratif tetapi tidak sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dokumen mutu dan praktik nyata.

Dari hasil wawancara informal, sebagian guru mengakui bahwa

penyusunan dokumen mutu sering kali dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif. Hal ini memperkuat temuan bahwa budaya mutu belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik profesional guru.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan budaya organisasi dan kesadaran profesional tenaga pendidik. Dengan kata lain, persoalan utama bukan pada ada atau tidaknya sistem, tetapi pada sejauh mana sistem tersebut diinternalisasi dalam praktik sehari-hari.¹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama dalam implementasi SPMI bukan terletak pada desain sistem, melainkan pada aspek manusia dan budaya organisasi. Tanpa adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya mutu, sistem yang telah dirancang dengan baik akan sulit memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, penguatan SPMI harus diarahkan pada pembentukan budaya mutu yang kuat, didukung oleh struktur organisasi yang efektif dan

¹⁶ Harvey and Green, "Defining Quality"

sistem teknis yang memadai. Pendekatan ini menegaskan bahwa mutu bukan sekadar prosedur, tetapi merupakan praktik yang harus dihidupkan dalam keseharian institusi pendidikan.

Pembahasan

Permasalahan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tidak dapat dilepaskan dari faktor organisasi yang melingkupinya. Struktur organisasi yang belum kuat sering kali menyebabkan unit penjaminan mutu tidak memiliki daya dorong yang memadai untuk memastikan implementasi berjalan secara konsisten di seluruh unit. Dalam kerangka teori organisasi, struktur yang lemah akan menghasilkan lemahnya fungsi kontrol dan koordinasi, sehingga sistem yang telah dirancang secara baik tidak mampu diimplementasikan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem tidak hanya ditentukan oleh desainnya, tetapi juga oleh kekuatan struktur yang menopangnya.

Kelemahan struktural tersebut umumnya terlihat dari posisi unit

penjaminan mutu yang belum strategis dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, rekomendasi hasil audit mutu internal tidak memiliki kekuatan eksekusi karena tidak terintegrasi dengan kebijakan pimpinan. Padahal, dalam perspektif manajemen mutu, pengendalian dan tindak lanjut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus peningkatan kualitas. Tanpa adanya otoritas yang jelas, fungsi penjaminan mutu hanya akan berhenti pada tataran administratif.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia memperparah lemahnya struktur tersebut. Tidak semua personel yang terlibat dalam penjaminan mutu memiliki kompetensi dalam analisis mutu, evaluasi pendidikan, maupun pengelolaan data. Akibatnya, audit mutu internal sering kali hanya menghasilkan temuan deskriptif tanpa analisis akar masalah (*root cause analysis*). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan prasyarat penting dalam efektivitas SPMI.

Namun demikian, persoalan struktural pada dasarnya masih dapat

diperbaiki melalui kebijakan dan restrukturisasi. Tantangan yang jauh lebih kompleks justru terletak pada aspek kultural. Budaya mutu berkaitan dengan kesadaran kolektif, nilai, dan kebiasaan yang hidup dalam organisasi. Ketika budaya mutu belum terbentuk, maka seluruh perangkat SPMI hanya akan dijalankan sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai kebutuhan intrinsik.

Fenomena ini terlihat jelas dalam praktik pengisian dokumen mutu yang sering dilakukan tanpa refleksi substantif. Guru mengisi laporan pembelajaran, RPS, atau instrumen evaluasi sekadar untuk memenuhi kewajiban, tanpa menjadikannya sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Padahal, dalam perspektif Islam, setiap amal dituntut untuk dilakukan secara optimal. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan.” (QS. Al-Baqarah: 195).

Ayat ini menegaskan bahwa kualitas bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi merupakan bagian

dari nilai spiritual yang harus diinternalisasi dalam setiap aktivitas, termasuk dalam dunia pendidikan.

Budaya mutu yang lemah juga tercermin dari minimnya inisiatif perbaikan yang bersifat mandiri. Dalam organisasi yang memiliki budaya mutu kuat, perbaikan tidak menunggu instruksi, tetapi lahir dari kesadaran profesional. Sebaliknya, dalam lingkungan yang belum memiliki budaya mutu, perubahan hanya terjadi karena tekanan eksternal, seperti akreditasi atau evaluasi institusional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPMI sangat bergantung pada internalisasi nilai, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan.

Dalam konteks ini, hadis Rasulullah SAW memberikan landasan yang kuat tentang pentingnya kualitas dalam bekerja:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia menyempurnakannya.” (HR. Thabrani).

Hadis ini menegaskan bahwa profesionalisme dan kualitas kerja merupakan bagian dari nilai keimanan. Dengan demikian, implementasi SPMI

seharusnya tidak dipandang sebagai beban administratif, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual.

Di samping faktor struktural dan kultural, aspek teknis juga menjadi kendala yang signifikan. Sistem informasi mutu yang belum terintegrasi menyebabkan data tersebar dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks manajemen modern, data merupakan dasar utama dalam pengambilan keputusan. Tanpa data yang terintegrasi, proses evaluasi menjadi lemah dan cenderung subjektif.

Sebagai contoh, data akademik seperti kehadiran guru, capaian pembelajaran, dan tingkat kepuasan siswa sering kali tersimpan dalam sistem yang berbeda. Ketika dilakukan evaluasi mutu, data tersebut harus dikompilasi secara manual, yang tidak hanya memakan waktu, tetapi juga berpotensi menimbulkan bias. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem informasi bukan sekadar alat bantu, tetapi merupakan bagian integral dari sistem mutu itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan temuan di SMP IT Insan Mulia, terlihat bahwa

implementasi SPMI menghadapi persoalan klasik, yaitu kesenjangan antara sistem formal dan praktik nyata. Secara struktural, perangkat mutu telah tersedia, namun belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perubahan.

Data observasi menunjukkan bahwa kualitas implementasi SPMI sangat bergantung pada kesadaran individu guru. Guru yang memiliki komitmen terhadap mutu cenderung menjadikan RPP sebagai panduan nyata dalam pembelajaran, serta melakukan evaluasi secara reflektif. Sebaliknya, guru yang belum memiliki kesadaran mutu cenderung menjalankan sistem secara administratif.

Fenomena ini menguatkan argumen bahwa keberhasilan SPMI lebih ditentukan oleh faktor kultural dibandingkan struktural. Sistem yang baik tidak akan memberikan dampak signifikan jika tidak didukung oleh budaya mutu yang kuat. Dalam konteks ini, guru menjadi aktor kunci dalam menentukan hidup atau matinya sistem mutu di tingkat sekolah.

Lebih jauh, temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis dalam SPMI perlu dilengkapi dengan pendekatan humanistik dan nilai. Tanpa menyentuh dimensi kesadaran dan nilai, sistem mutu akan tetap berada pada level prosedural. Oleh karena itu, penguatan SPMI di SMP IT Insan Mulia perlu diarahkan pada pembentukan kesadaran profesional guru melalui pembinaan, refleksi kolektif, dan kepemimpinan yang inspiratif.

Dalam perspektif pendidikan Islam, penguatan SPMI perlu dilakukan melalui pendekatan integratif yang menggabungkan aspek teknis dan spiritual. Nilai-nilai seperti *muhasabah* (evaluasi diri), *ihsan* (kualitas terbaik), dan *amanah* (tanggung jawab) dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun budaya mutu. Pendekatan ini memberikan dimensi makna yang lebih dalam terhadap praktik penjaminan mutu.

Konsep *muhasabah* misalnya, dapat diterapkan dalam evaluasi diri program studi. Evaluasi tidak hanya dilakukan untuk menilai capaian angka,

tetapi juga untuk merefleksikan kualitas proses. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.” (QS. Al-Hasyr: 18).

Ayat ini menegaskan pentingnya refleksi dan evaluasi sebagai bagian dari proses perbaikan diri, yang dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai evaluasi mutu.

Lebih lanjut, diperlukan perubahan paradigma dalam memahami SPMI. Selama ini, SPMI sering diposisikan sebagai sistem yang berorientasi pada kepatuhan (*compliance-based system*). Paradigma ini perlu digeser menjadi sistem yang berorientasi pada peningkatan (*improvement-based system*), di mana fokus utama bukan pada pemenuhan standar, tetapi pada upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Perubahan paradigma ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara pandang institusi dalam

mengelola mutu. SPMI tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing dan kualitas lulusan. Dengan demikian, SPMI dapat berfungsi secara substantif, bukan sekadar simbolik.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SPMI tidak ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi oleh sejauh mana sistem tersebut mampu mengubah perilaku organisasi. Tanpa transformasi budaya dan internalisasi nilai, SPMI akan tetap berada pada level administratif. Sebaliknya, jika nilai mutu telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif, maka SPMI akan hidup sebagai praktik yang nyata dalam keseharian institusi pendidikan.

D. Kesimpulan

SPMI merupakan sistem yang memiliki peran strategis dalam menjamin mutu lembaga pendidikan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek struktural, kultural, dan teknis.

Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada sistem, tetapi pada budaya organisasi. Oleh karena itu, penguatan SPMI harus diarahkan pada pembentukan budaya mutu yang kuat, didukung oleh kepemimpinan yang visioner dan sistem yang terintegrasi.

Dalam pendidikan Islam, penguatan tersebut perlu disertai dengan integrasi nilai-nilai spiritual agar mutu tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki makna etis dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.

Arcaro, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Crosby, Philip B. *Quality is Free*. New York: McGraw-Hill, 1979.

Deming, W. Edwards. *Out of the Crisis*. Cambridge: MIT Press, 1986.

Dill, David D. "The Regulation of Public Research Universities: Changes in Academic Competition and

- Implications for University
Autonomy and Accountability.”
Higher Education Policy 20, no. 1
(2007): 21–35.
- Harvey, Lee, and Diana Green. “Defining
Quality.” *Assessment &
Evaluation in Higher Education*
18, no. 1 (1993): 9–34.
- Ibn Khaldun. *The Muqaddimah: An
Introduction to History*. Beirut: Dar
al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Martin, Michaela, and Antony Stella.
*External Quality Assurance in
Higher Education: Making
Choices*. Paris: UNESCO, 2007.
- Newton, Jethro. “Views from Below:
Academics Coping with Quality.”
Quality in Higher Education 8, no.
1 (2002): 39–61.
- Sallis, Edward. *Total Quality
Management in Education*.
London: Kogan Page, 2012.
- Stensaker, Bjørn. “Quality as Fashion:
Exploring the Translation of a
Management Idea into Higher
Education.” *Quality Assurance in
Education* 15, no. 1 (2007): 99–
118.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.